



**PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU**



RINGKASAN LPPD 2023

LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

 (0426) 2324500

 www.mamujukab.go.id

 Jl. Soekarno Hatta No. 1

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH
(RLPPD) KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2023**

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO :

Ukuran dari kemajuan proses pembangunan daerah saat ini didekati dengan beberapa faktor. Determinan yang sering digunakan diantaranya angka capaian kinerja makro. Data-data tersebut menggambarkan sejauh mana perkembangan keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ukuran capaian kinerja makro merupakan representasi hasil dari berbagai Program yang sudah diselenggarakan oleh pemerintahan daerah maupun pusat, serta swasta dan pihak terkait lainnya dalam Pembangunan Nasional. Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,35	71,07	0,72
2	Angka Kemiskinan	7,63	7,57	-0,06
3	Angka Pengangguran	3,06	2,99	-0,07
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,24	4,37	1,13
5	Pendapatan Perkapita	46,51	49,18	2,67
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,388	0,37	-0,02

Berdasarkan beberapa indikator makro tersebut, didapati beberapa catatan berikut:

- 1) Pada Tahun 2023, IPM Kabupaten Mamuju sebesar 71,07. Angka ini meningkat dibandingkan kondisi tahun sebelumnya sebesar 70,35. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan perubahan sumber data Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH₀). Awalnya berdasarkan data SP2010 menjadi data hasil pendataan Long form SP2020. Perubahan ini mempengaruhi nilai absolut IPM yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dibandingkan angka sebelumnya. Saat ini, data IPM perhitungan baru tersebut yang tersedia hanya tahun 2021



hingga 2023. Jika dilihat datanya selama tiga tahun terakhir, IPM Kabupaten memiliki trend meningkat dengan rata-rata laju sekitar 0,63 point per tahun. Dilihat dari klasifikasi IPM menurut UNDP, IPM Kabupaten Mamuju tergolong kategori sedang.

- 2) Kemiskinan masih menjadi permasalahan penting yang perlu perhatian. Pada tahun 2023 ada meskipun persentasenya turun dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan tersebut belum signifikan, hanya 0,05 persen. Perkiraan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 sekitar 22.135 orang. Sementara, perkiraan jumlah di tahun sebelumnya sebesar 21.946 orang. Artinya penurunan sebesar 0,05 tersebut bisa jadi belum berdampak nyata pada upaya pengurangan penduduk miskin. Hal ini bisa terjadi karena kecepatan penurunan penduduk miskin belum bisa mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Pertimbangan lain yang juga penting adalah perlunya upaya penyediaan lapangan kerja yang bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk level pendapatan rendah.
- 3) Angka pengangguran yang digambarkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 0,07 persen. Meskipun angkanya terus menurun, pemerintah perlu tetap siaga karena volatilitas angka pengangguran masih cukup tinggi. Jika dilihat dari sudut pandang program pengurangan angka kemiskinan, hingga saat ini pemerintah belum memiliki program khusus yang dirancang mengatasi masalah pengangguran. Sehingga para pembuat kebijakan masih perlu mengkaji dan menyusun strategi yang tepat dan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas harga. Keberhasilan upaya ini dapat dilihat dari tingkat inflasi kabupaten Mamuju yang selalu berada di bawah target inflasi yang ditetapkan Bank Sentral.
- 4) Pertumbuhan ekonomi kabupaten mamuju terus membaik jika dibandingkan dengan kondisi pandemi. Pada tahun 2023 tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten mamuju kembali meningkat sekitar 1,13 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini cukup menggembirakan karena pertumbuhan ekonomi kabupaten Mamuju dalam tiga tahun terakhir selalu tumbuh positif dengan peningkatan yang cukup baik.
- 5) Pendapatan per kapita penduduk kabupaten Mamuju yang didekati dengan PDRB perkapita mencapai 49,18 juta rupiah per tahun. Angka ini meningkat sekitar 2,67 juta dibandingkan tahun 2022.



- 6) Jika dilihat dari rasio ketimpangan pendapatan, pada tahun 2023 gini rasio di kabupaten mamuju sebesar 0.37. Masih tergolong moderat, namun pemerintah tetap memberi perhatian intensif terhadap masalah ketimpangan. Penurunan ini didukung dengan data lain seperti tingkat kedalaman dan keparahan. Pada tahun yang sama, tingkat kedalaman kemiskinan di kabupaten mamuju sebesar 0,79, membaik dibandingkan tahun 2022 sebesar 0.98. Sementara itu untuk tingkat keparahan angkanya mencapai 0,13 atau turun 0,05 dibandingkan tahun 2022. Kedua angka tersebut memberikan gambaran umum tentang kondisi masyarakat miskin yang semakin mengelompok dan relatif homogen dalam hal variasi pengeluarannya. Informasi ini membuat penentuan strategi penanggulangan dan penanganan kemiskinan menjadi lebih mudah karena karakteristik subjek yang akan ditangani memiliki ciri yang hampir sama. Artinya target penanganan melalui program pemerintah akan lebih terarah.

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk diantaranya :

2.1. Urusan Pendidikan

2.1.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	43,95	75,83
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	79,45	105,05
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	83,52	85,31
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	6,82	98,28



NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023
	yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		

2.1.2. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tahun 2023 sebesar Rp. 108,070,099,742 dan serapan anggaran sebesar 99,63% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan, Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) dan Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD).
- 2) Program SPM Pendidikan Dasar dengan kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B), Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B), Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) dan Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B).
- 3) Program Pendidikan Kesetaraan dengan kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan), Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan),

2.1.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya angka partisipasi sekolah khususnya untuk jenjang pendidikan PAUD yang hanya mencapai 76.97 % hal ini disebabkan Kondisi geografis atau kondisi medan antara jarak rumah dengan sekolah terutama kondisi daerah pedalaman, Sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai masih banyak sekolah berstatus swasta dan belum terakreditasi minimal B Rendahnya penerimaan orang tua terhadap penyelenggaraan PAUD Belum semua orang tua memahami pentingnya PAUD, rendahnya kesadaran masyarakat tersebut dapat dipengaruhi banyak hal. Misalnya faktor pendidikan orang tua, faktor sosial, dan faktor ekonomi.
- 2) Perlu ditingkatkan angka partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan



SMP yang capaiannya 85.31 % termasuk kondisi sarana dan prasarana sekolah, Faktor sosial dan ekonomi seperti pernikahan diusia muda, anak yang bekerja membantu perekonomian keluarga dan sebagian pemahaman orang tua bahwa anak yang sudah bersekolah dijenjang SD/Mi sudah mempunyai dasar membaca dan menulis dan tidak perlu melanjutkan sekolah ke jenjang SMP

2.2. Urusan Kesehatan

2.2.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,18	2,75
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	85,48	89,24
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	93,45	96,46
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,16	96,63
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	71,77	87,07
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75,14	83,64
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	61,35	78,81
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	77,48	88,92



NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87,62	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,60	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	72,65	82
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	91,63	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	71,49	90,75

2.2.2. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar Rp. 10,060,573,823 dan serapan anggaran sebesar 93,78% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2.2.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Pengumpulan Data

- Masih adanya masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan belum memiliki Nomor Induk Kependudukan sehingga datanya tidak bisa dimasukkan dalam Rekap format pelaporan secara elektronik.
- Masih adanya data pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Klinik kesehatan, dan tempat praktek Dokter swasta masih bentuk jumlah/angka.

2) Penghitungan kebutuhan



- Penghitungan kebutuhan belum memfokuskan pada pemenuhan semua standar pelayanan yang ada di setiap indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam pemenuhan barang dan jasa sesuai standar dalam penyelenggaraan SPM BK.

3) Perencanaan dan Penganggaran

- Belum semua Puskesmas melaksanakan perencanaan dengan melakukan identifikasi masalah berdasarkan skala prioritas isu permasalahan yang harus diselesaikan.
- Alokasi anggaran di sektor kesehatan belum mampu mengakomodir semua sub indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

4) Pelaksanaan

- Masih adanya Ibu Hamil tidak memeriksakan diri ke Faskes
- Adanya Kehamilan yang tidak diinginkan mengakibatkan Bumil tidak memeriksakan Kehamilan di awal Kehamilan (K1 murni)
- Akses ke fasilitas kesehatan sulit
- Masih ada Ibu Hamil melahirkan di Dukun.
- Ketersediaan Alat dan bahan sesuai standar pelaksanaan pelayanan SPM BK yang belum cukup seperti (ODGJ Kit) dan Bahan dukung pelayanan kesehatan lainnya (Media KIE, rapor kesehatan anak sekolah, Buku kesehatan lansia, Strip pemeriksaan kolesterol).
- Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin disarana pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan UKBM (Posyandu, Posbindu).
- Ketidaktahuan sebagian masyarakat terkait hak nya untuk mendapatkan pemeriksaan/pelayanan kesehatan secara rutin.
- Pengobatan yang tidak sesuai standar/tidak rutin karena masih kurangnya kepatuhan dan pendampingan minum obat khususnya bagi penderita PTM (Hipertensi dan ODGJ Berat)
- Masih adanya beberapa daerah sulit, jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan mengakibatkan masyarakat belum bisa mendapatkan pelayanan sesuai standar, seperti pelayanan Ibu hamil yang minimal 4 kali selama masa kehamilan, persalinan yang di luar fasilitas kesehatan karena keterlambatan mengakses fasilitas pelayanan kesehatan/puskesmas.
- Adanya beban ganda bagi beberapa pemegang program seperti pelaksana Penyakit Tidak Menular, Nutrisi, dan Tenaga



penyuluh di beberapa puskesmas karena jumlah tenaga yang masih kurang.

- Tenaga Dokter/Dokter Gigi yang belum tersedia di beberapa Puskesmas mengakibatkan adanya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar seperti pelayanan usia pendidikan dasar.
- Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor khususnya pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Masih minimnya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan monev pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mengakibatkan belum meratanya pemahaman Definisi Operasional dan penyelenggaraan SPM BK sesuai Permenkes No.4 tahun 2019 oleh pelaksana program.

2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	7,75	0
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	7,44	0
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	47,45	43,31
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan	70,49	71,76



NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023
	bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	73	74,05
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	53,31	43,77
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	0
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100

2.3.2. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Mamuju Tahun 2023 sebesar Rp. 17,328,393,545 dan serapan anggaran sebesar 92,05% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2.3.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Mamuju Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Belum maksimalnya serapan anggaran yang di karenakan keterlambatan lelang sehingga pekerjaan fisik di lapangan mengalami keterlambatan,dan masuk ke dana luncturan tahun 2024 solusinya mempercepat jadwal lelang sehingga waktu pengerjaan bisa sesuai dengan target yang diharapkan.
- 2) Belum adanya kelembagaan (UPTD) yang terbentuk khusus penanganan air limbah dan IPLT belum berfungsi sehingga pengolahan air limbah



belum bisa di laksanakan secara maksimal.

2.4. Urusan Perumahan dan Permukiman

2.4.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Permukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	40,34	100
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	0
3	 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0,19	0,80
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	24,04	20,84
5	 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	38,87	0,78

2.4.2. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Mamuju Tahun 2023 sebesar Rp. 920,509,118 dan serapan anggaran sebesar 99,95% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

2.4.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Mamuju Tahun 2023 adalah sebagai



berikut :

- 1) Dari sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamuju masih memiliki permasalahan yaitu:
- 2) Keterbatasan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju khususnya pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju menyebabkan kurangnya Capaian Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana. Juga kurangnya sumber daya manusia yang memahami terkait pelaksanaan pemenuhan SPM juga merupakan salah satu penyebab kurang maksimalnya pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di Kabupaten Mamuju
- 3) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Mamuju sedikit terbantu dengan adanya koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sehingga pemenuhan SPM dapat dilaksanakan.

2.5. Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.5.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	76,78	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	97,35	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	12,04	100



NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	90	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,6	11

2.5.2. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman umum dan Perlindungan Masyarakat di pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Tahun 2023 sebesar Rp. 2.910.625.040 dan serapan anggaran sebesar 98.65 % Sedangkan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Sebesar 601.261.260 dengan serapan anggaran sebesar 93.49 % dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum) dengan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar) dengan kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
- 3) Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan) dengan Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

2.5.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mamuju Tahun 2023



adalah sebagai berikut :

- 1) Beberapa Indikator SPM Bidang Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang tidak mendapatkan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan/ program sehingga target tidak tercapai.
- 2) Keterbatasan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju khususnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju menyebabkan kurangnya Capaian Pelayanan pencegahan dan penanganan korban bencana.

2.6. Urusan Sosial

2.6.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	IKK Outcome	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100

2.6.2. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kabupaten Mamuju Tahun 2023 sebesar Rp. 834,853,073 dan serapan anggaran sebesar 100% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- 1) Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

2.6.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kabupaten Mamuju Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



- 1) Kurangnya sumber daya manusia/aparatatur dalam upaya percepatan standar pelayanan minimal (SPM)
- 2) Kurang atau minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan terutama kendaraan operasional
- 3) Kurang atau minimnya dana dalam pelaksanaan kegiatan
- 4) Kurangnya koordinasi antar sector

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Berisi ringkasan hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya

3.1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Kabupaten Mamuju berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2,5639 dan status kinerja Rendah

3.2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 09.A/LHP/XIX.MAM/05/2023 Tanggal 15 Mei 2023 Kabupaten berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 yang berarti

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju hasil audit BPK Tahun 2023, realisasi belanja Kabupaten Mamuju Tahun 2023 mencapai Rp. 1.164.158.456.520

Rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

4.1. Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	116.138.327.293,00	101.272.745.140,85	87,2
2	Pendapatan Transfer	1.051.590.924.035,00	1.046.739.513.501,00	98,54
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	48.723.560.000,00	48.651.458.839,00	99,85
Jumlah		1.216.452.811.328,00	1.196.663.717.480,85	98,37



4.2. Belanja

Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	452.078.055.030,00	424.150.602.261,00	93,82
2	Belanja Barang Jasa	340.201.557.570,00	321.713.121.321,00	94,57
3	Belanja Hibah	38.875.335.786,00	21.937.785.972,00	56,43
Jumlah Belanja Operasi		831.154.948.386,00	767.801.509.554,00	92,38
Belanja Modal				
1	Belanja Modal Tanah	508.361.248,00	108.925.000,00	21,43
2	Belanja Modal Peralatan Mesin	63.917.026.815,00	60.351.283.235,00	94,42
3	Belanja Modal Gedung Bangunan	129.871.509.435,00	111.326.417.318,00	85,72
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi Jaringan	83.212.871.898,00	66.168.909.423,00	79,52
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.278.014.050,00	5.567.898.050,00	105,49
6	Belanja Modal Aset Lainnya	147.600.000,00	147.180.908,00	99,72
Jumlah Belanja Modal		282.935.383.446,00	243.670.613.934,00	86,12
Belanja Tak Terduga				
1	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	41.258.973,00	8,25
Jumlah Belanja Tak Terduga		500.000.000,00	41.258.973,00	8,25
Transfer Bantuan Keuangan				
1	Bagi Hasil	5.846.331.012,00	3.959.920.458,00	67,73
2	Bantuan Keuangan	148.733.636.540,00	148.685.153.601,00	99,97
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		154.579.967.552,00	152.645.074.059,00	98,75
Jumlah Belanja dan Transfer Daerah		1.269.170.299.384,00	1.164.158.456.520,00	91,73

5. INOVASI DAERAH

Berisi ringkasan inventarisasi berbagai inovasi daerah yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang telah dilakukan dan masih berjalan pada tahun pelaporan berdasarkan Database Inovasi Daerah. Dapat pula memasukkan Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
1	Inspektorat Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah Berbasis QR Code (Inter Code)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah dengan menggunakan QR Code dalam menginventarisir Barang Milik Daerah
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jebol UMKM (Jemput Bola Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	Program inovasi yang dikembangkan oleh DPMPSTP Mamuju dengan mengunjungi langsung para pelaku UMKM di tempat usahanya dan membantu menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) secara gratis di tempat usaha masing-masing



NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mamuju Bergemass (Mamuju Bergerak Bersama Masyarakat Gapai Air Bersih & Sanitasi Sehat	Inovasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi sehat masyarakat melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat di setiap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Inovasi ini dilakukan untuk mendukung pembangunan sarana yang dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat
4	Dinas Kesehatan	Angngatangku Sehat Keren (ASEK)	Berupa forum yang bergerak pada usaha peningkatan kesehatan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk seperti sosialisasi dan edukasi hidup sehat, pemeriksaan rutin penyakit menular dan upaya pergerakan masyarakat untuk meningkatkan aktifitas fisik juga konsumsi makanan bergizi
5	Badan Pendapatan Daerah	e-NPWP	NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) adalah layanan elektronik yang di kelola oleh Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kesadaran dan memotivasi semua aparatur bapenda Kabupaten Mamuju dan masyarakat dalam hal perpajakan dan retribusi daerah, sehingga penerimaan Pajak Daerah dapat memenuhi target agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Mamuju.
6	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil	LOPIS (Layanan Online Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Aplikasi Lopis ini merupakan sebuah layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mamuju yang memudahkan masyarakat Kabupaten Mamuju dalam melakukan pengurusan layanan administrasi kependudukan secara online melalui laman http://lopis.dukcapi.mamujukab.go.id



6. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan ikhtisar atau rangkuman dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2023 yang telah disampaikan kepada Presiden RI melalui kementerian Dalam Negeri pada Bulan Maret Tahun 2024 yang kemudian dievaluasi secara nasional melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD).

Secara menyeluruh penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Mamuju tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur pemerintah daerah dan segenap masyarakat se Kabupaten Mamuju.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan permasalahan yang belum dapat ditangani secara optimal, sehingga sangat dibutuhkan peran aktif semua elemen masyarakat untuk senantiasa memberikan masukan yang positif dalam upaya menyempurnakan strategi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

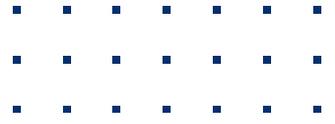
Untuk itu atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Mamuju, 27 Maret 2024



BUPATI MAMUJU

Hj. SITI SUTINAH SUHARDI, SH.,M.Si



**PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU**



(0426) 2324500



www.mamujukab.go.id



Jl. Soekarno Hatta No. 1